

## Internalisasi Landasan Teologis, Filosofis, Psikologis, dan Sosiologis dalam *Strategic Planning* Pendidikan

M. Asif Nur Fauzi<sup>1</sup>, Toto Suryadi<sup>2</sup>, Faiz Karim Fatkhullah<sup>3</sup>, Achmad Saefurridjal<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Stebi Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan, <sup>2</sup>Akademi Maritim Pembangunan Jakarta, <sup>3</sup>Universitas Islam Nusantara, Bandung, <sup>4</sup>Universitas Islam Nusantara, Bandung

\*Corresponding Author. e-mail: [asif.elek24@gmail.com](mailto:asif.elek24@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan kredibilitas satuan pendidikan dimasyarakat yang ditandai adanya tindakan penyimpangan dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pentingnya internalisasi landasan teologi (agama), landasan filosofi, landasan psikologis, landasan sosiologis dalam *strategic planning* pendidikan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode library research. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan melakukan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa internalisasi teologis (agama) dalam *strategic planning* dilakukan berdasarkan unsur dalam mencari ilmu (nadzoman dalam kitab alala) dan introspeksi diri dalam surat al hasyr 58. Internalisasi landasan filosofis dalam *Strategic planning* didasarkan pada filosofi rekonstruksionisme progresivitas lembaga pendidikan dengan mengacu pada pandangan empirisme, rasionalisme, dan idealisme. Internalisasi landasan psikologis dilakukan dengan memanusiakan manusia dalam proses formulasinya menyangkut masa depan warga sekolah seperti peserta didik, guru, dan stakeholder. Internalisasi landasan sosiologis dalam *Strategic planning* yakni dengan menyelaraskan pengelolaan pendidikan dengan konteks masyarakat.

**Kata Kunci:** internalisasi, landasan teologi, filosofis, psikologis, sosiologis, *strategic planning* pendidikan

### Abstract

*The background of this research is the decline in the credibility of education units in the community, which is indicated by acts of irregularities in the management of educational institutions. This study aims to provide an overview of the importance of internalizing theological (religious) foundations, philosophical foundations, psychological foundations, and sociological foundations in educational strategic planning. The research was conducted using a qualitative approach and library research methods. The data were analyzed with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study show that the internalization of theology (religion) in strategic planning is carried out based on elements of seeking knowledge (nadzoman in Alala Book) and self-introspection in Surat al Hasyr 58. The internalization of the philosophical basis in strategic planning is based on the philosophy of reconstructionism of the progressivity of educational institutions concerning views of empiricism, rationalism, and idealism. Internalization of the psychological basis is carried out by humanizing humans in the formulation process regarding the future of school members such as students, teachers, and stakeholders. Internalization of the sociological basis in Strategic planning is by aligning education management with the community context.*

**Keyword:** internalization, theological, philosophy, psychological, sociological foundation, educational strategic planning

Submitted: 2 Februari 2023; Revised: 15 Maret 2023; Accepted: 1 April 2023

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini ditandai dengan perubahan dari era digital, *era industry 4.0*, dan *era society 5.0*. Perubahan era-era tersebut membawa dampak pada kehidupan manusia yaitu dinamika kemampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan zaman tersebut. Dengan adanya perubahan yang pesat tersebut menuntut seseorang untuk mampu berubah dalam merespon atas perubahan tersebut. Berkaitan dengan tuntutan zaman tersebut berdampak pada konsep pendidikan saat ini yang juga senantiasa berubah setiap tahunnya. Perubahan tersebut mulai dari KTSP, Kurikulum 2013, sampai dengan kurikulum merdeka belajar. Perubahan kurikulum tersebut memiliki dinamika konsep pendidikan yang berbeda pada setiap targetnya. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) lebih memfokuskan pada aspek kognitif sebagai ketercapaian kompetensi lulusannya. Sedangkan kurikulum 2013 tuntutan pada pencapaian kompetensi lulusan menjadi berkembang yakni menekankan keseimbangan antara *hardskill dan softskill*. Keseimbangan tersebut merupakan ketercapaian antara kemampuan dalam kognitif, psikomotorik, dan afektif.

Berbeda juga dengan implementasi kurikulum merdeka belajar pada aspek kelulusan yang menjadi targetnya adalah peserta didik tidak hanya mengetahui dalam membaca tetapi mampu memahami isi buku yang dibaca dan mampu menganalisa pemecahan masalahnya. Meskipun terjadinya perubahan dalam dinamika kurikulum yang saat ini terjadi setiap lembaga pendidikan memiliki amanah dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

Pendidikan merupakan upaya sistemik dan terencana serta memiliki tujuan luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional bahwa tujuan nasional pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Marita Sari, 2019). Sesuai dengan tujuan nasional tersebut menunjukkan bahwa kompetensi yang harus dicapai seorang peserta didik tidak hanya pada aspek kognitif saja melainkan aspek keterampilan dan *morality* dalam bertindak juga menjadi aspek yang harus dicapai oleh seorang lulusan.

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah lembaga pendidikan harus mampu mengimplementasikan sebuah target pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan di tengah dinamika perubahan kurikulum yang dilakukan pemerintah. Upaya dalam mengimplikasikan pendidikan sesuai dengan tujuan di atas diperlukan *strategic planning* yang efektif agar lembaga pendidikan memiliki kredibilitas dalam penyelenggarakannya. Hal ini menggambarkan bahwa manajemen pendidikan dalam implementasinya diperlukan *strategic planning* dalam visi satuan pendidikan sebagai tujuannya.

Pentingnya *strategic planning* pada satuan pendidikan didasarkan pada setidaknya 3 (tiga) aspek dasar yaitu siswa (input), proses belajar mengajar (proses), dan kualitas lulusan (*output*). Dasar pertama, Siswa merupakan asset satuan pendidikan yang dikembangkan menurut potensi dan bakat yang dimiliki. Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan menjadi ukuran kredibilitas di masyarakat khususnya pada satuan pendidikan berbasis masyarakat (swasta). Jumlah siswa pada sekolah swasta menjadi tolak ukur beberapa aspek diantaranya keuangan, kredibilitas sekolah, dan kebutuhan data dapodik. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu standar nasional yang harus

dikelola dengan transparan dan akuntabel karena menyangkut pengembangan siswa, pengembangan guru, dan pengembangan sarana dan prasarana. Maka dari itu jumlah siswa sebagai input menjadi tolak ukur, apabila jumlah siswa meningkat maka sumber daya keuangan meningkat namun sebaliknya jika jumlah siswa menurun maka sumber daya keuangan juga menurun.

Dampak dari penurunan sumber keuangan suatu lembaga pendidikan mengakibatkan lembaga tersebut tidak mampu berkembang dan menggambarkan bahwa kredibilitas lembaga di masyarakat rendah dan akan berdampak pada eksistensi lembaga tersebut dalam perkembangannya atau yang disebut dengan *gulung tikar*. Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan media Jawa Pos bahwa pada tahun 2021 pada banyak sekolah negeri di wilayah Surakarta Jawa Tengah memiliki problematika kekurangan murid sehingga pemerintah setempat mengambil langkah *regrouping* untuk menyelamatkan masa depan guru dan peserta didik pada sekolah yang memiliki daya saing lembaga rendah tersebut (JawaPos.com, 2021).

Berdasarkan kondisi di atas, menunjukkan bahwa pentingnya *strategic planning* dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mampu dalam meningkatkan kredibilitas lembaga di masyarakat agar mampu eksis dalam perolehan input (siswa) setiap tahunnya. Upaya meningkatkan daya saing tersebut suatu lembaga pendidikan tidak hanya menawarkan program studi saja melainkan peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas output yang dihasilkan sebagai tolak ukur kredibilitas lembaga di masyarakat.

Dasar kedua, kualitas proses pembelajaran merupakan salah satu standar nasional yang harus mampu ditingkatkan kualitasnya karena amanah satuan pendidikan dalam tujuan nasional pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa maka proses belajar mengajar menjadi tolak ukur. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah banyaknya mindset orang tua yang menganggap nilai lebih dari akhlaq menjadi problematika dasar yang terjadi di dunia pendidikan. Meskipun seorang guru diharapkan tidak hanya mampu dalam *transfer knowledge* tetapi juga mampu mentransfer moral kepada siswanya. Maka dari itu kualitas pendidik dalam proses belajar mengajar harus mampu dijaga kualitasnya oleh manajemen satuan pendidikan.

Dasar ketiga, lulusan (*output*), kompetensi lulusan merupakan salah satu standar nasional yang menjadi tujuan setiap nasional. Hal ini merupakan implikasi dari implementasi dari proses yang dilakukan oleh satuan pendidikan baik dalam proses pengembangan diri siswa, penilaian hasil belajar, dan karir siswa sesuai dengan capaian visi dan misi satuan pendidikan.

Namun dalam kajian empiris tidak sedikit sekolah khususnya pada background masyarakat (swasta) mengutamakan input daripada proses dan output peserta didiknya. Hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan tujuan nasional pendidikan yang terkandung dalam undang-undang sisdiknas bahwa kompetensi yang harus dicapai seorang lulusan yakni kemampuan *hardskill* dan *softskill*. Sesuai dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masuknya input yang beragam tersebut suatu lembaga pendidikan harus mampu mengolah keberagaman menjadi output yang sesuai dengan visi dan misi serta standar nasional pendidikan sebagai tolak ukurnya.

Sesuai dengan tolak ukur di atas, maka peran manajemen pendidikan dalam upaya meningkatkan kredibilitas sekolah dengan memperhatikan visi, misi dan standar nasional pendidikan (SNP) sebagai tolak ukurnya maka diperlukan suatu *strategic planning* yang efektif dan sesuai dengan kondisi empiris, rasional, dan ideal. Hal ini sesuai dengan S. Djuni Prihatin (2019: 53) dalam bukunya teori perencanaan bahwa perencanaan adalah proses menyusun formulasi alternatif strategis untuk dapat mencapai tujuan organisasi serta gambaran aktivitas organisasi. Dalam teori manajemen perencanaan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya pencapaian tujuan. (Prihatin, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah perencanaan tidak dapat disusun hanya dari sektor pimpinan saja melainkan melibatkan semua unsur manajemen lembaga pendidikannya. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan *strategic planning* membutuhkan gambaran-gambaran kondisi lembaga dan koordinasi serta pengawasan yang dilakukan untuk terwujudnya kualitas lembaga pendidikan yang kredibel dan mampu menjawab tuntutan zaman yang senantiasa berubah secara pesat.

Hal ini telah dikisahkan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi yang memerlukan waktu 6 hari. Meskipun dalam kenyataannya Allah mampu menciptakan segala sesuatu dalam sekejap "*Kun fayakun*". Diperlukannya waktu 6 hari itu dalam kisahnya karena Allah menyusun suatu

rencana terkait tanggung jawab para malaikat dalam tugasnya misalnya siapa yang memberi wahyu, siapa yang memberi rizki, dan siapa yang mencabut nyawa. Selain tanggung jawab yang diberikan bentuk koordinasi yang dilakukan agar pengawasan Allah dalam penciptaan bumi dan langit tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sesuai dengan kisah tersebut menggambarkan bahwa peran manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya berhenti pada satu tujuan saja tetapi mengenai tanggungjawab serta pelaksanaan dan pengawasannya agar tujuan dari pendidikan yang diharapkan atau dicita-citakan dapat tercapai sesuai visi setiap lembaga sekolah.

Sesuai dengan gambaran tentang pentingnya *strategic planning* dalam upaya mewujudkan lembaga pendidikan yang kredibel dan progresif, maka diperlukannya internalisasi landasan teologis, filosofis, psikologis, dan sosiologis dalam proses penyusunannya. Hal ini dikarenakan perlunya menginternalisasi landasan tersebut adalah agar sekolah mampu memajemen lembaganya dengan mengkaitkan semua unsur terkait serta visi dan misi lembaga sebagai acuan didalamnya agar *strategic planning* yang disusun dapat memenuhi aspek objektif dan efektif dalam pencapaiannya.

Landasan teologis merupakan landasan yang berdasar atas keyakinan lembaga. Keyakinan lembaga diperlukan dalam proses penyusunan *strategic planning* karena keyakinan merupakan landasan mendasar yang harus ditanamkan untuk terwujudnya lembaga yang berketuhanan dan dalam penyelenggaraannya dan pengelolaannya sesuai dengan ajarannya. Pada lembaga yang memiliki background Agama Islam misalnya dengan menanamkan nilai-nilai Islam dalam proses penyusunan *strategic planning* tersebut diharapkan manajemen lembaga pendidikan tidak melakukan perbuatan yang negative seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan pengembangan peserta didik di sekolah. Landasan teologis ini penting ditanamkan karena tidak sedikit kepala sekolah yang menyelewengkan dana bos untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka internalisasi landasan teologis dalam *strategic planning* ini diperlukan untuk terwujudnya program lembaga yang sesuai dengan kebutuhan lembaganya sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan.

Urgensitas perencanaan strategis ini dikarenakan pendidikan merupakan kewajiban semua manusia. Sesuai dengan sabda nabi Muhammad yakni :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

Artinya : mencari ilmu adalah kewajiban bagi muslimin dan muslimat (HR. Ibnu Majah). Hal ini jika dikaitkan dengan pentingnya perencanaan strategi, maka kewajiban semua umat manusia (muslimin dan muslimat) dalam mencari ilmu harus direncanakan agar tujuan dari mencari ilmu tersebut. Hal ini jika dikaitkan dengan lembaga pendidikan maka lembaga harus mampu mengakomodasi proses pencapaian tujuan tersebut dalam perencanaan yang strategis. Hal ini sesuai dengan pendapat Ismail Nawawi (2012: 2) mengatakan bahwa manajemen (tadbir/idarah) itu adalah suatu aktifitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu kegiatan. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang hendak dicapai dapat terlaksana secara efektif dan efisien (Suja'i, 2018).

Landasan filosofis merupakan landasan yang ditanamkan agar lembaga pendidikan menjadi lembaga yang memiliki daya saing dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang telah diamanahkan dalam visi lembaga dan standar nasional pendidikan. Maka dari itu, landasan filosofis tersebut ditanamkan dalam penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Menurut Manap Somantri (2013) yang dikutip dari Ebni Sholikhah (2019) bahwa perencanaan merupakan kegiatan yang memenuhi identifikasi, inventarisasi, dan menyeleksi kebutuhan sesuai dengan prioritas dalam menentukan strategi, alternatif, dan sasaran dalam mencapai tujuan. Maka dari itu diperluka perencanaan yang komprehensif dan visioner agar mampu merespon dinamika problematika sosial (Sholikhah, 2019).

Landasan filosofis yang ditanamkan dalam proses penyusunan *strategic planning* pendidikan adalah sesuai dengan empirisme, idealisme, dan rasionalisme. Ketiga landasan tersebut perlu diinternalisasikan karena berkaitan dengan kondisi saat ini lembaga, kondisi ideal lembaga sesuai dengan standar nasional pendidikan dan visi lembaga, dan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan lembaga. Tujuan dari internalisasi landasan filosofis di atas agar

penyusunan *strategic planning* dapat disusun secara sistematis, objektif dan realistis. Hal ini penting dilakukan dalam proses penyusunan *strategic planning* tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemimpin seorang diri melainkan adanya pelibatan banyak orang didalamnya, maka diperlukan landasan psikologis dalam prosesnya.

Landasan psikologis merupakan landasan yang memiliki nilai penting dalam *strategic planning*. pentingnya landasan psikologis dalam proses formulasi rencana pendidikan dikarenakan berkaitan dengan jiwa dan perasaan manusia. Maka dari itu landasan psikologis tersebut dianggap penting karena perumusan dan pelaksanaan pendidikan serta ketercapaian tujuan pendidikan dilaksanakan oleh seorang manusia.

Landasan sosiologis merupakan landasan yang diperlukan lembaga pendidikan dalam menentukan pangsa pasar lembaga dalam mengelola pendidikan. Internalisasi tersebut diperlukan agar lembaga memiliki kredibilitas dalam pengelolaannya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya menjadi lembaga yang sekedar menggugurkan kewajiban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya landasan sosiologis tersebut diinternalisasikan dalam *strategic planning* pendidikan adalah adanya perubahan sosial di masyarakat yang cepat berubah karena perkembangan zaman yang juga cepat berubah. Hal ini perlunya direspon oleh lembaga pendidikan dalam *upgrade* informasi dan *upgrade* kompetensi dalam mempertahankan eksistensi lembaganya.

Sesuai gambaran di atas bahwa perencanaan pendidikan dilakukan dengan tujuan sebagai upaya *responsive* satuan pendidikan dalam dinamika perkembangan sosial dan pendidikan yang sangat cepat. Beberapa alternatif yang dilakukan dalam proses perencanaan pendidikan dilakukan salah satunya dengan proses evaluasi. Proses evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan sekolah. Hal ini sesuai dengan penelitian Dwi Siswoyo (2018) bahwa upaya perbaikan sekolah harus mampu diidentifikasi melalui pendekatan kultural. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menyentuh nilai inti yang menjadi dasar pertumbuhan pendidikan. Pengembangan budaya sekolah yang dapat dilakukan adalah melakukan perubahan nilai inti (*core values*) seperti komitmen dan kesadaran warga sekolah dalam membangun interaksi yang kondusif (Siswoyo et al., 2018). Dengan adanya transformasi budaya sekolah dalam perbaikan tersebut diharapkan mampu untuk mendapatkan hasil evaluasi dan perencanaan yang sesuai.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mami Hajaroh (2018) bahwa evaluasi merupakan bagian dari perencanaan yang komprehensif karena dalam evaluasi tersebut merupakan proses menilai suatu kebijakan yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan/suatu program dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Hal ini menunjukkan bahwa objektivitas dalam proses evaluasi sangat diperlukan karena ketepatan dalam menentukan program ditentukan oleh penilaian pengguna kebijakan (Hajaroh, 2018). Pentingnya penilaian tersebut menunjukkan bahwa sebuah kebijakan dalam pendidikan ditentukan sebagai dasar dari perencanaan pendidikan.

Proses perencanaan pendidikan merupakan suatu kegiatan rasional yang didasari oleh analisis yang sistematis dan berorientasi pada perkembangan pendidikan yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat. sesuai dengan pentingnya perencanaan pendidikan tersebut diharapkan semua sector baik dari segi pemerintah dan satuan pendidikan dapat merumuskan sesuai dengan standarisasi yang relevan. Relevansi tersebut dikaji oleh Ebni Sholikhah (2019) sebagai peminjaman pendidikan (*borrowing policy*) dalam perencanaan pendidikan. Peminjaman kebijakan dimaknai tahap analitis yang lebih rigid sesuai metode ilmiah, meskipun hasil akhirnya tetap digunakan untuk rekomendasi perencanaan kebijakan. Maka dalam peminjaman tersebut diharuskan memperhatikan akurasi informasi, kelengkapan elemen, dan atensi terhadap konteks wilayahnya. Ketepatan dalam melakukan adopsi kebijakan tersebut harus sesuai dengan kondisi empiric suatu satuan pendidikan karena setiap lembaga memiliki ciri khas yang berbeda (Sholikhah, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas suatu perencanaan yang dilakukan satuan pendidikan harus mengacu pada filosofi pendidikan agar dalam penyelenggaraannya tidak terjadi mal implementasi yang mengganggu eksistensi satuan pendidikan dan makna pendidikan itu sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Abdul Salam (2022) bahwa Pada dasarnya suatu perencanaan pendidikan/managemen pendidikan itu dapat dilaksanakan dengan cara yang sesuai jelas arah dan

tujuan serta efektif dan efisien atas relevan isi kurikulumnya, apabila dilaksanakan dengan mengacu pada suatu dasar tertentu. Yakni dasar yang kokoh, sebab adanya dasar yang kokoh itu dapat mengembangkan serta memberi perubahan pada pendidikan untuk menuju atau mencapai suatu tujuan dan arah yang jelas secara maksimal (Salam, 2022).

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah di atas, maka diperlukan kajian mendalam tentang internalisasi landasan teologis, filosofis, psikologis, dan sosiologis dalam penyusunan *strategic planning* pendidikan. Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan pertanyaan dalam penelitian ini diantaranya 1) bagaimanakah kajian internalisasi landasan teologis dalam penyusunan *strategic planning* pendidikan? 2) bagaimanakah kajian internalisasi landasan filosofis dalam penyusunan *strategic planning* pendidikan? 3) Bagaimanakah internalisasi landasan psikologis dalam penyusunan *strategic planning* pendidikan? 4) Bagaimanakah internalisasi landasan sosiologis dalam penyusunan *strategic planning* pendidikan?.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian study kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji literatur ilmiah yang relevan dengan topic *strategic planning* pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perkembangannya dalam *open content* dokumen yang ada dengan merelevansikan dengan kondisi faktual satuan pendidikan. Dengan adanya hasil analisis tersebut dapat di lakukan penarikan kesimpulan dari fenomena yang terjadi dengan relevansi kajian ilmiah yang bersumber dari data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep *strategic planning* dalam pendidikan**

Dunia pendidikan saat ini sedang dihadapkan dalam perkembangan zaman yang mengalami dinamika perubahan sangat pesat. Perubahan-perubahan tersebut memberikan tuntutan kompetensi pada manusia untuk mampu dalam merespon perkembangan tersebut. Pesatnya perubahan dengan segala tuntutan didalamnya harus mampu direspon oleh lembaga-lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertujuan dalam pengembangan peserta didiknya sebagai output didalamnya. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional pendidikan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional bahwa pengembangan peserta didik tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan saja melainkan aspek keterampilan atau kecakapan dan moral peserta didik dalam bertindak juga menjadi aspek yang harus dicapai dalam tujuan tersebut (Marita Sari, 2019)

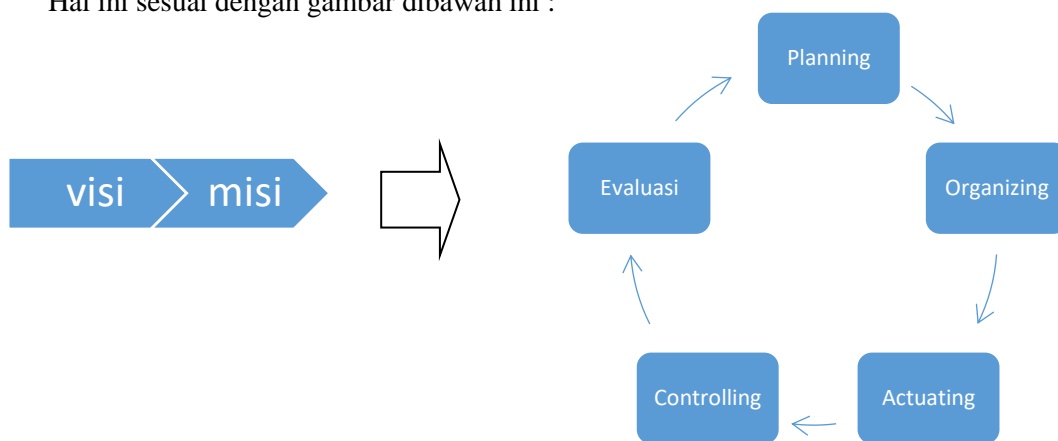
Sesuai dengan amanah tersebut, maka diperlukan sebuah manajemen pendidikan yang mampu memformulasikan suatu *strategic planning* dalam upaya merespon dinamika perubahan zaman yang sangat pesat. Pesatnya perubahan zaman saat ini menuntut individu dapat mengikuti tuntutan yang diberikan. Hal ini tentu harus direspon oleh manajemen sekolah dalam merencanakan atas hasil analisa literatur dan pemberitaan baik digital maupun *paper*. Hal ini diperlukan sebagai bahan penunjang informative dalam penyusunan *strategic planning* dalam satuan pendidikan.

Konsep perencanaan merupakan upaya organisasi dalam menentukan kejelasan sasaran dari tujuan yang digunakan sebagai dasar dalam menjalankan fungsi manajemen organisasi. Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan maka *strategic planning* merupakan formulasi rencana manajemen lembaga pendidikan dalam mengelola dan mencapai visi satuan pendidikan.

Hal ini ditunjang dengan pendapat Nasrun (2013) dalam Santika (2017) bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan harus memiliki perencanaan yang serius dan profesional. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan organisasi social yang memiliki tujuan mencerdaskan peserta didik dari segi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Apabila manajemen satuan pendidikan tidak mampu dalam perencanaan yang profesional, maka berimbas pada eksistensi satuan pendidikan di masa mendatang, ekstensi satuan pendidikan berkaitan dengan kredibilitas satuan pendidikan. Wujud

keseriusan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah memberikan pembelajaran yang berkualitas, pemenuhan fasilitas sarana, dan prasarana. (Santika, 2017). Menurut Coombs dalam Sahnun (2017) bahwa perencanaan pendidikan merupakan proses penyusunan formula yang rasional yang bertujuan untuk perkembangan pendidikan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat (Ichsan & Hadiyanto, 2021). Sesuai dengan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam pendidikan merupakan upaya terencana yang sistematis dan berorientasi pada tujuan pendidikan yakni perkembangan pendidikan yang efektif dan efisien serta memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan gambar dibawah ini :



Bagan 1. Proses penyusunan *Strategic Planning* Pendidikan

Sesuai dengan bagan di atas dapat dideskripsikan bahwa proses perumusan *strategic planning pendidikan*, pertama adalah proses mendefinisikan visi dan misi suatu lembaga pendidikan. Proses mendefinisikan visi dan misi ini penting dilakukan karena bagian dari pencapaian cita-cita lembaga. Kedua, melakukan evaluasi untuk mengetahui potensi, kesenjangan, serta perkembangan kebijakan yang relevan dengan pendidikan. Pentingnya proses evaluasi ini agar proses perencanaan yang akan diformulasikan menjadi *strategic planning* yang efektif dan tepat sasaran. Ketiga, melakukan proses formulasi perencanaan. Pada tahap evaluasi dan perencanaan seorang pimpinan sekolah tidak dapat melakukan perencanaan seorang diri dan membutuhkan organ lain untuk dapat memberikan gambaran informative tentang potensi, kesenjangan bahkan analisis lingkungan guna efektifnya *strategic planning* yang akan diformulasikan.

Keempat, proses menentukan penanggungjawab yang dapat melaksanakan program yang direncanakan agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kelima, mensosialisasikan tentang program yang telah di rencanakan tersebut untuk dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi sekolah. Keenam, pengawasan dalam aktivitas program pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa hal diantaranya supervisi dan laporan berkala dari penanggung jawab. Dengan adanya proses perumusan *strategic planning* yang tersistem tersebut dapat berdampak pada penyelenggaraan pendidikan yang unggul dan kredibel di masyarakat.

Konsep perencanaan dalam pendidikan merupakan upaya yang memformulasikan rencana-rencana strategis yang mampu mensinergikan sumber daya yang dimiliki dengan daya saing kelembagaan. Dalam proses penyusunan formulasi *strategic planning* pendidikan perlu menginternalisasi landasan teologis, filosofis, psikologis dan sosiologis didalamnya. Hal ini dikarenakan eksistensi kelembagaan dalam pendidikan tidak hanya sekedar berkembang secara permukaan saja tetapi progresivitas lembaga pendidikan harus menyeluruh baik dalam pengelolaan input lembaga (siswa), pengelolaan kualitas pembelajaran, dan kualitas output lembaga (lulusan).

### Internalisasi landasan teologis dalam *strategic planning* pendidikan

Berdasarkan hasil pemaparan di atas perencanaan strategis dalam pendidikan merupakan upaya memformulasikan rencana-rencana strategis dalam memenuhi kebutuhan dan dan tujuan

peserta didik dan masyarakat secara efektif, efisien, objektif. Berkaitan dengan perencanaan strategis yang efektif, efisien, dan objektif tersebut diperlukan internalisasi landasan teologis dalam proses penyusunannya. Tujuan dari internalisasi tersebut adalah memasukkan nilai-nilai keyakinan atau agama dalam formulasi *strategic planning* tersebut agar dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan secara positif tanpa ada penyimpangan dalam implementasinya. Beberapa penyimpangan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan misalnya penyelewengan penggunaan dana bos yang tidak dipergunakan untuk kebutuhan lembaga tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah dan bendaharannya. Maka internalisasi teologis dalam perencanaan strategis pendidikan penting untuk mampu membatasi tindak penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Pada nadzoman kitab Alala Tanalulil yang dikarang oleh syeikh Burhanuddin Al Islam Al Zarnuji bahwa ada 6 hal yang harus dipenuhi yaitu cerdas, semangat, sabar, biaya, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Jika ditafsirkan dan dikaitkan dengan *strategic planning* bahwa setiap satuan pendidikan dalam upaya mewujudkan peserta didik yang cerdas, maka proses pembelajaran yang dilakukan seorang guru harus mengacu pada kurikulum yang digunakannya dan melakukan evaluasi secara berkala agar output yang diharapkan dapat dicapai. *Dzaka'* merupakan istilah lain dari kemampuan daya ingat seseorang dalam menilai dan memahami sebuah ilmu.

Sesuai dengan penafsiran di atas jika dikaitkan dengan *strategic planning* pendidikan bahwa *transfer knowledge* yang disampaikan oleh guru harus mampu disampaikan untuk siswa secara keseluruhan. Permasalahan di sekolah adalah masih belum meratanya pengetahuan siswa dalam menerima pembelajaran yang diberikan seorang guru. Hal ini ditunjukkan dengan hasil ujian pasti ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai dibawah ketuntasan kompetensi minimum (KKM) dikelas. Strategi yang dilakukan guru untuk mewujudkan output dengan diberikan remedi agar nilai siswa mencapai KKM. Namun pencapaian nilai sesuai dengan standar bawah KKM sebenarnya belum menjawab permasalahan pengetahuan yang belum merata dalam satu kelas tersebut.

Syarat kedua adalah Semangat. Cinta adalah emosi yang berfungsi memperkuat kaitan ilmu dalam ingatan. Kecintaan ilmu tersebut menggambarkan semangat peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini jika dikaitkan dengan *strategic planning* pendidikan maka setiap satuan pendidikan dapat merencanakan suasana pembelajaran yang dapat memberikan jiwa semangat kepada peserta didik dan pendidik yang diharapkan mampu mewujudkan *output* sesuai visi dan misi satuan pendidikan yang telah disepakati sebagai *goal*.

Kesabaran merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam proses meraih kesuksesan. Kesabaran merupakan sikap yang ditunjukkan dalam proses belajar mengajar. Keberagaman dalam kemampuan peserta didik memerlukan kesabaran seorang guru untuk mengantarkan kesuksesan peserta didiknya. Pada konteks peserta didik kesabaran diperlukan dalam kaitannya dengan belajar karena belajar peserta didik menjadi memiliki daya ingat yang berkualitas.

Setiap satuan pendidikan mendapatkan amanah dalam undang-undang sisdiknas bahwa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dapat diartikan bahwa sikap sabar harus mampu diterapkan oleh guru dan siswa karena ketuntasan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut bukan hanya tuntas dalam belajar melainkan juga pada moral lulusan. Hal ini antara keduanya wajib bersabar untuk menjadi insan yang berdaya saing.

Biaya merupakan unsur penting dalam proses mencari ilmu jika dikaitkan dengan *strategic planning* maka dapat tafsirkan bahwa peran manajemen lembaga pendidikan adalah kemampuan dalam mengelola keuangan sebagai langkah memenuhi fasilitas pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi proses pengembangan potensi peserta didik. Standar pembiayaan merupakan aspek yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam pengelolaannya karena berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Biaya memang menjadi syarat wajib dalam mencari ilmu namun dalam situasi nyata terdapat permasalahan empiris yakni masih adanya peserta didik yang menunggak dalam pembayaran biaya sekolah, hal ini yang seringkali menjadi problematika dalam manajemen sekolah khususnya upaya penagihan kepada peserta didik.

Akan tetapi manajemen pendidikan memiliki alternatif untuk dapat memenuhi problem tersebut dengan mengoptimalkan Dana BOS, BOPP, dan Program Indonesia Pintar. Alternatif – alternatif tersebut harus mampu dioptimalkan dalam penyusunan *strategic planning* sekolah agar jika



terjadi problematika di tahun berikutnya dapat diatasi dengan dana-dana yang bersumber dari pemerintah tersebut.

Petunjuk guru merupakan syarat utama dalam mencari ilmu karena seorang guru merupakan panutan dalam berfikir dan bersikap. Sesuai dengan penafsiran di atas jika dikaitkan dengan *strategic planning* maka berkaitan dengan bagaimana mewujudkan falsafah guru “*digugu lan ditiru*” dalam mengimplementasikan apa yang disampaikan guru dalam proses pembelajaran dalam diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi tolak ukur lembaga pendidikan dalam mewujudkan output lulusan dalam kehidupan bermasyarakat.

syarat keenam adalah waktu yang lama. Waktu yang lama, artinya orang belajar perlu waktu yang lama. Lama di sini bukan berarti tanpa target, sebab orang belajar harus punya target. Berkaitan dengan *strategic planning* maka dapat tafsirkan waktu yang lama tersebut diartikan sebagai kemampuan lembaga pendidikan dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat. Perlunya *strategic planning* dalam upaya pendidikan sepanjang hayat adalah kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menjadi lembaga yang berdaya saing. Hal ini dikarenakan jika satuan pendidikan tidak memiliki kemampuan dalam daya saing maka akan menjadi satuan pendidikan yang statis dan tidak berkembang.

Sesuai dengan penafsiran pesan dalam nadzoman di atas dapat disimpulkan bahwa *strategic planning* pendidikan dikaji dari dimensi teologi mencakup Daya saing Lembaga, Kualitas Pembelajaran, dan daya saing lulusan. Ketiga komponen tersebut menjadi perhatian serius dalam aspek *strategic planning*. Hal ini dikarenakan perencanaan dalam pendidikan menyangkut perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang sehingga dalam proses memformulasikan *strategic planning* tersebut harus ditanamkan nilai-nilai agama didalamnya agar proses formulasi yang dilakukan dapat mewujudkan *strategic planning* yang mampu menjawab tantangan zaman yang senantiasa mengalami dinamika perubahan didalamnya. Maka dalam proses formulasi tersebut diperlukan beberapa hal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun *strategic planning* tersebut. Salah satu hal yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan formulasi *strategic planning* pendidikan adalah evaluasi lembaga atau yang biasa disebut dengan kondisi empiric lembaga. Kondisi empiric ini diambil dari gambaran implementasi pendidikan yang telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan surat Al Hasyr 59: 18 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Al Hasyr 58: 18).

Menurut Tafsir Al-Qurthubiy menunjukkan bahwa taqwa merupakan implikasi dari menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Implikasi tersebut dapat diperjelas dengan melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan dan menajuhi segala perbuatan yang dilarang dalam segala aspek kehidupan oleh Allah SWT . Sesuai dengan tafsir di atas dapat diambil suatu falsafah bahwa setiap manusia diwajibkan untuk mampu memilah mana perilaku yang *haq* (baik) dan mana yang *batil* (salah). Hal itu ditunjukkan dengan cara manusia dalam berintrospeksi diri terhadap perilaku yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan potongan ayat dibawah ini:

**وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ** ang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)’. Menurut beberapa murassir kata *ghad* ( ) memiliki banyak arti. Pada tafsir Al Qurthubi menjelaskan bahwa kata di atas merupakan hari esok atau kiamat. Hal ini dapat diartikan bahwa instrospeksi diri merupakan langkah evaluasi yang dilakukan seseorang dan meresapi perilaku yang telah dilakukan. Maka jika dikaitkan dengan pendidikan maka instrospeksi diri dianalogikan sebagai evaluasi diri atau rapor mutu pendidikan.

Berdasarkan potongan ayat di atas maka proses introspeksi diri sebuah lembaga tidak dapat dilakukan hanya dari sisi kepemimpinan sekolah saja karena dalam implementasi pendidikan dalam suatu lembaga dilaksanakan semua unsur sekolah yakni wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Maka dalam proses evaluasi diri lembaga penting untuk melibatkan semuanya untuk

mendapatkan gambaran implementasi pendidikan secara objektif. Dengan adanya evaluasi yang objektif tersebut suatu lembaga pendidikan dapat memiliki gambaran perkembangan suatu lembaga pendidikan yang empiris.

Gambaran perkembangan lembaga pendidikan secara empiris inilah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun *strategic planning* lembaga pendidikan yang efektif, efisien, dan rasional dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang ideal baik secara peraturan perundang-undangan (Standar Nasional Pendidikan) maupun menjawab tuntutan zaman serta memenuhi kebutuhan di kehidupan masyarakat.

### **Internalisasi landasan filosofis dalam *strategic planning* pendidikan**

Sesuai dengan penafsiran di atas jika dikaitkan dengan *strategic planning* pendidikan dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan perencanaan yang baik adalah diawali dari introspeksi diri atau evaluasi diri dari implementasi pendidikan yang telah dilaksanakan. Tujuan dari *strategic planning* pendidikan adalah untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang progresif dalam penyelenggaraannya. Progresifitas tersebut dapat dilihat dari tingkat kredibilitas lembaga pendidikan dalam menjawab tuntutan zaman dan kebutuhan di kehidupan bermasyarakat.

Untuk mampu menjadi lembaga pendidikan yang progresif tersebut penting kiranya menanamkan landasan filosofis pendidikan secara konsisten dan komitmen agar tujuan penyelenggaraan pendidikan senantiasa tercapai sesuai dengan visi dan misi lembaga, maka dari itu *strategic planning* yang diformulasikan baik setiap tahun maupun jangka panjang dilandasi oleh evaluasi lembaga secara berkala dilakukan. Hal ini dilakukan karena dinamika perubahan zaman selalu berubah dengan pesat sehingga tuntutan dalam mengembangkan kompetensi peserta didik tentu harus mampu direspon dengan cepat dan tepat oleh lembaga pendidikan.

Internalisasi landasan filosofis yang sesuai dalam *strategic planning* pendidikan di era perubahan zaman tersebut adalah filosofi Rekonstruksionisme yang mengacu pada landasan empirisme, rasionalisme, dan idealisme. Fahaman Rekonstruksionisme berasal dari kata *reconstruct* yang memiliki arti “menyusun kembali”. Rekonstruksionisme merupakan satu paham filsafat yang bertujuan melanjutkan gerakan progresivisme. Filsafat rekonstruksionisme juga merupakan elaborasi lanjutan dari gerakan progresivisme. Mereka juga menekankan tentang perbedaan terhadap individual seperti kaum progresif, akan tetapi rekonstruksionisme lebih menekankan terhadap pemecahan masalah, berpikir kritis dan sejenisnya.

Jika dikaitkan dalam satuan pendidikan fahaman rekonstruksionisme digunakan untuk memecahkan masalah yang menyangkut problematika satuan pendidikan dimasa lampau untuk digunakan dasar penyusunan *strategic planning* untuk tahun berikutnya. Setiap satuan pendidikan memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah yang dijadikan dasar dalam implementasi program kerja yang telah disepakati perencanaannya. Guna mencapai visi tersebut maka diperlukan bahan evaluasi atas implementasi yang dijalankan.

Evaluasi dalam manajemen satuan pendidikan diperlukan untuk meninjau dan merefleksikan diri seberapa jauh implementasi suatu program kerja dalam jangka waktu 1 tahun kebelakang atau lima tahun kebelakang serta kendala yang terjadi. Dengan begitu perlunya disusun kembali suatu *strategic planning* yang berdasar pada evaluasi dan masalah di masa lalu dengan tujuan progresivitas satuan pendidikan.

Pentingnya rekonstruksionisme dalam *strategic planning* pendidikan jika dikaji secara ontologis bahwa dinamika perkembangan pendidikan sangat dipengaruhi oleh perubahan zaman yang sangat cepat sehingga setiap satuan pendidikan dituntut untuk mampu merespon perubahan tersebut secara rasional dalam proses perencanaannya. Rasionalitas proses perencanaan tersebut tentu memerlukan evaluasi dalam menentukan indikator ketercapaian dan kendala dalam implementasi pendidikan secara menyeluruh. Maka dari itu pentingnya *strategic planning* pendidikan harus direkonstruksi adalah agar satuan pendidikan dapat menentukan kendala dan ketercapaian pendidikan secara empiris.

Fakta empiris merupakan pengetahuan yang berasal dari pengalaman manusia dan mengecilkkan peranan akal (Novianto, 2021). Sesuai dengan pengertian tersebut jika dikaitkan dengan kajian *strategic planning* pendidikan, maka proses perencanaan dalam satuan pendidikan didasari

oleh pengalaman implementasi yang telah dilaksanakan. Maka dari itu fakta empiris dan evaluasi yang objektif memiliki peranan penting dalam sebuah kegiatan perencanaan yang dilakukan satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mami Hajaroh (2018) bahwa evaluasi merupakan proses nilai dan menilai kebijakan yang diimplementasikan. Penilaian tersebut dijadikan sebagai pengambilan keputusan seorang pimpinan dalam menentukan sebuah program tersebut dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan (Hajaroh, 2018). sesuai dengan gambaran di atas bahwa kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh satuan merupakan bagian dari cerminan implementasi dimasa lampau untuk dapat dijadikan dasar rekonstruksi perencanaan di masa mendatang.

Rekonstruksionisme *strategic planning* pendidikan jika dikaji secara epistemologi menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan sebagai kegiatan rasional yang didasari oleh analisis sistematis proses pendidikan dengan tujuan agar pencapaian tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Efektifitas suatu pendidikan dapat dikaji dari kesesuaian kebutuhan dan tujuan peserta didik dan sosial masyarakat. hal ini sesuai dengan pernyataan Commbs dalam Abdul Salam (2022) bahwa perencanaan pendidikan merupakan suatu penerapan kegiatan yang didasari oleh rasionalitas dan analisis sistematis terhadap perkembangan pendidikan yang bertujuan untuk pendidikan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Maka dari itu, proses perencanaan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif dalam menentukan alternative dan strategi pencapaiannya.

Pentingnya melakukan evaluasi dalam proses perencanaan pendidikan bertujuan untuk dapat mengetahui dan menganalisa kinerja pendidikan dalam lembaga. Hal ini dikarenakan posisi evaluasi berada diantara pengawasan dan perencanaan dalam struktur manajemen pendidikan. Perubahan dan perkembangan pendidikan merupakan bagian dari indikator ketercapaian dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan. Dengan adanya rekonstruksi *strategic planning* diharapkan satuan pendidikan dapat menentukan program yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Hal ini sesuai dengan penelitian Abdul slam (2022) bahwa Pada dasarnya suatu perencanaan pendidikan / manajemen pendidikan itu dapat dilaksanakan dengan cara yang sesuai jelas arah dan tujuan serta efektif dan efisien atas relevan isi kurikulumnya, apabila dilaksanakan dengan mengacu pada suatu dasar tertentu. dengan adanya dasar yang kokoh itu dapat mengembangkan serta memberi perubahan pada pendidikan untuk menuju atau mencapai suatu tujuan dan arah yang jelas secara maksimal.

Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk membangun kualitas pendidikan dan digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas diantaranya *Assesment Nasional Berbasis Computer (ANBK)*, penilaian kinerja kepala sekolah, dan akreditasi satuan pendidikan. *Assesment Nasional Berbasis Computer (ANBK)* merupakan evaluasi pendidikan yang mengukur indikator kemampuan peserta didik dan guru dalam aspek literasi dan numerasi. Selain dua aspek tersebut *assesment* tersebut juga mengukur iklim kebhinekaan dan keamanan sekolah yang ditunjukkan dalam produk Rapor pendidikan. Penilaian kinerja kepala sekolah merupakan proses penilaian yang dilakukan pemerintah dengan sasaran kinerja kepala sekolah dalam mengelola pendidikannya. Beberapa langkah pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pentingnya evaluasi pendidikan dalam proses penyusunan perencanaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya rekonstruksi *strategic planning* pendidikan dapat mengsinergikan antara evaluasi dan pengawasan dalam mewujudkan perencanaan pendidikan yang evaluative, rasional, dan ideal dalam penyelenggaraannya.

Sesuai dengan kajian epistemologi di atas, maka secara aksiologis rekonstruksi *strategic planning* pendidikan ditunjukkan dengan perencanaan yang efektif dan objektif diperlukan evaluasi yang objektif dari implementasi pendidikan yang diselenggarakan baik setiap tahun maupun per semester. Pentingnya fakta empiris yang objektif dalam penyusunan formulasi perencanaan tersebut setiap lembaga pendidikan akan mengetahui dan memahami posisi lembaga secara mendalam bukan hanya mengetahui permukaannya saja. Didalam mewujudkan kondisi empiris suatu lembaga tidak dapat dilakukan hanya dari analisis kuantitatif dalam evaluasinya. Analisis kualitatif dalam evaluasi lembaga dengan interaksi warga sekolah juga menjadi alternatif dalam memperdalam keadaan sekolah secara objektif dan menyeluruh sehingga formulasi *strategic planning* memiliki dasar yang digunakan sebagai tolak ukur tentang alternatif-alternatif program yang rasional dan ideal untuk menata lembaga pendidikan tersebut di masa mendatang.

Jika dalam menyusun formulasi *strategic planning* tidak diukur secara rasional ditakutkan *strategic planning* tersebut salah dalam menentukan prioritas program yang dibutuhkan dalam pengembangan lembaga pendidikan. Rasionalitas tersebut dapat ditempuh melalui beberapa alternative tindakan seperti melakukan analisis rapor mutu pendidikan dan hasil evaluasi kinerja kepala sekolah yang bersumber dari dinas pendidikan serta analisis hasil supervise yang dilakukan. Dengan adanya perpaduan tersebut proses komunikasi yang dilakukan manajemen satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta menyusun formulasi perencanaan yang tepat dan efektif. Proses identifikasi tersebut merupakan bagian dari nilai dan menilai kebijakan satuan pendidikan di masa lampau. Dengan cara seperti itu proses perencanaan strategis pada esensinya bukan pada tahun ajaran baru adalah program baru tetapi eksistensi satuan pendidikan di masa mendatang berdasar pada evaluasi di masa lalu atau periode tahun pelajaran sebelumnya.

Hal ini bertujuan agar eksistensi satuan pendidikan dapat memenuhi kondisi ideal lembaga baik dalam konteks nasional maupun daya saing lembaga dan lulusan. Maka dari itu rekonstruksionisme diartikan sebagai langkah evaluatif dalam satuan pendidikan untuk dapat membangun budaya progresif dalam penyelenggaraannya. Sedangkan teori idealisme merupakan standar yang dijadikan sebagai tolak ukur suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang akan dicapainya. Landasan idealisme dalam *strategic planning* merupakan gambaran ideal yang didasarkan oleh sebuah aturan dan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas lembaga dengan kondisi empiris yang saat ini diformulasikan. Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam memenuhi idealisme pendidikan adalah 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

Sesuai dengan pemaparan di atas jika dikaji dari aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologi esensi dari rekonstruksi *strategic planning* pendidikan berdasar pada bagaimana evaluasi pendidikan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan satuan pendidikan di setiap tahun pelajarannya. Hal ini diperlukan karena dinamika daya saing lulusan dalam dunia industry dan usaha memiliki tantangan yang berubah dengan cepat sehingga *responsibility* dan rekonstruksi perencanaan penting dilakukan.

### **Internalisasi landasan psikologis dalam *strategic planning* pendidikan**

Psikologi sosial adalah suatu studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok sosial. Para ahli dalam bidang interdisipliner ini pada umumnya adalah para ahli psikologi atau sosiologi, walaupun semua ahli psikologi sosial menggunakan baik individu maupun kelompok sebagai unit analisis mereka. Definisi psikologi sosial sendiri merupakan studi yang menginvestigasi bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain baik aktual maupun imajinatif. Psikologi sosial sempat dianggap tidak memiliki peranan penting, tetapi kini hal itu mulai berubah. Dalam psikologi modern, psikologi sosial mendapat posisi yang penting. Psikologi sosial telah memberikan pencerahan bagaimana pikiran manusia berfungsi dan memperkaya jiwa dari masyarakat kita. Melalui berbagai penelitian laboratorium dan lapangan yang dilakukan secara sistematis, para psikolog sosial telah menunjukkan bahwa untuk dapat memahami perilaku manusia, kita harus mengenali bagaimana peranan situasi, permasalahan, dan budaya.

*Strategic planning* yang menggunakan paham rekonstruksionisme tersebut jika dikaji dari dimensi psikologis tentu saja psikologi sosial telah memberikan pencerahan bagaimana pikiran manusia berfungsi dan memperkaya jiwa dari masyarakat kita. Melalui berbagai penelitian laboratorium dan lapangan yang dilakukan secara sistematis, para psikolog sosial telah menunjukkan bahwa untuk dapat memahami perilaku manusia, kita harus mengenali bagaimana peranan situasi, permasalahan, dan budaya. Peranan landasan psikologi sosial dalam *strategic planning* erat kaitannya dengan psikologi warga sekolah. keterkaitan antara psikologis dan perencanaan tersebut dikarenakan menyangkut perilaku manusia, peranan situasi dan kondisi, berbasis masalah, dan budaya kerja, maka dari itu landasan psikologis dalam *strategic planning* sangat penting.

### **Internalisasi landasan sosiologis dalam *strategic planning* pendidikan**

Secara etimologis, dalam bahasa Inggris kata ‘sosiologi’ disebut sociology yang dalam *Dictionary of Education-Oxford Reference* didefinisikan dengan “the study of the development, structure, and functioning of human society“. Singkatnya, *strategic planning* pendidikan berbasis

sosiologi adalah rencana pencapaian tujuan 5 tahunan suatu pembelajaran sistematis yang diinspirasi oleh ilmu kemasyarakatan, termasuk produk pemikiran para ahli sosiologi yang sesuai. Diantara aliran sosiologi yang sesuai menjadi basis *strategic planning* pendidikan adalah interaksionisme simbolik dengan tokohnya Herbert Blumer, yang inti gagasannya adalah pemikiran seseorang dibentuk oleh interaksi sosial.

Maksudnya, manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan pemikirannya dibentuk oleh interaksi sosial. Pembentukan pemikiran melalui proses interaksi sosial itu, dilakukan manusia melalui lima tahap, yaitu: (1) mempelajari makna dan simbol-simbol, yang mengarahkannya menuju kapasitas yang berbeda dengan lainnya; (2) bertindak dan berinteraksi secara berbeda, misalnya cara orang memaknai kesuksesan berbeda-beda atau perbedaan bahasa yang digunakan setiap suku juga berbeda; (3) memodifikasi atau mengubah makna dengan pertimbangan untung-rugi, yang mereka gunakan dalam proses interaksi sesuai interpretasi atas situasi sosial; dan (4) memilih salah satu makna, yang mereka anggap menguntungkan; dan (5) menentukan perbedaan pola tindakan dan kelompok berbeda dalam masyarakat.

Interaksi sendiri artinya hal saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi; antarmubungan, atau suatu jenis tindakan yang terjadi pada saat dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini penting dalam konsep interaksi, sebagai lawan dari hubungan satu arah pada *cause and effect*. Kombinasi dari interaksi-interaksi sederhana dapat menuntun pada suatu fenomena baru yang mengejutkan. Menurut pemahaman Sofyan Sauri, konsepsi sosiologis yang dibangun merujuk pada hakikat pendidikan yang memanusiakan manusia yang benar-benar menjadi manusia yang benar.

Landasan sosiologis dalam *strategic planning* pendidikan dapat dideskripsikan bahwa peran interaksi antar warga sekolah dalam proses penyusunan *strategic planning* merupakan gambaran dari masing-masing sumber daya atas evaluasi yang dilakukan atas implementasi program yang telah dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab dan tujuan yang diharapkan.

Proses penyusunan *strategic planning* ini tidak dapat disusun secara sentralistik seorang pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan. Maka diperlukan peran serta warga sekolah seperti wakil kepala sekolah dan beberapa guru yang diperlukan responnya untuk menunjang penyusunan rencana strategis. Respon tersebut diperlukan untuk mengetahui potensi yang menjadi kekuatan, hal-hal negatif yang menjadi faktor kelemahan, serta mengumpulkan informasi yang memiliki peluang untuk perkembangan lembaga pendidikannya, dan menyusun strategi atas indikasi atas potensi yang mengancam eksistensi lembaganya.

## SIMPULAN

Internalisasi *strategic planning* dikaji dari dimensi teologis digambarkan bahwa setiap satuan pendidikan harus mampu merumuskan 6 (enam) aspek modal pendidikan serta pentingnya introspeksi diri dalam penyusunan *strategic planning* penting dilakukan untuk mendapat informasi yang objektif sehingga perencanaan yang disusun sesuai dan tepat sasaran. Internalisasi landasan filosofis rekonstruksionisme dalam *strategic planning* penelitian ini merupakan upaya menyusun *strategic planning* karenan berbasis pemecahan masalah. Perencanaan menurut paham rekonstruksionisme tersebut menggunakan masa lampau untuk dasar penyusunan sebuah perencanaan internalisasi tersebut ditunjang dengan kondisi empirisme, rasionalisme, dan idealism pendidikan agar formulasi *strategic planning* dapat diwujudkan secara objektif dan efektif. Internalisasi landasan psikologis dalam formulasi memiliki peranan yang erat kaitannya kejiwaan manusia di masa mendatang seperti siswa, guru dan stakeholder, maka interaksi antar manusia (warga sekolah) dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas baik secara Sumber daya Manusia maupun lulusan. Internalisasi landasan sosiologis dalam *strategic planning* diharapkan mampu memberikan formulasi yang memiliki nilai manfaat pada pendidikan yang dapat memberikan jawaban atas tantangan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- arbainsyah, fauzi, a., mighwar, m. al, & nurjaman, u. (2022). perencanaan strategis pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi. *al-afkar*, 5(1), 72–86. [https://al-afkar.com/index.php/afkar\\_journal/article/view/237/130](https://al-afkar.com/index.php/afkar_journal/article/view/237/130)
- firmansyah, d., & dede. (2022). teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: literature review. *jurnal ilmiah pendidikan holistik (jiph)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- hajaroh, m. (2018). pohon teori evaluasi kebijakan dan program (metode, nilai dan menilai, penggunaan). *foundasia*, 9(1).
- ichsan, f. n., & hadiyanto, h. (2021). implementasi perencanaan pendidikan dalam meningkatkan karakter bangsa melalui penguatan pelaksanaan kurikulum. *jurnal studi guru dan pembelajaran*, 4(3), 541–551.
- jawapos.com. (2021). *kekurangan {murid}, {banyak} {sekolah} {negeri} {gulung} {tikar}*. jawa pos. <https://www.jawapos.com/pendidikan/02/05/2018/kekurangan-murid-banyak-sekolah-negeri-gulung-tikar>
- marita sari, d. (2019). pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional. *at turots: jurnal pendidikan islam*, 1(2). <https://doi.org/10.51468/jpi.v1i2.13>
- novianto, e. (2021). konsep filsafat ilmu barat. *jurnal an-nur: kajian ilmu-ilmu pendidikan dan keislaman*, 7(02), 161–183.
- prihatin, d. (2019). teori perencanaan. *buana grafika*, 148.
- salam, a. (2022). dasar filosofis perencanaan dalam pendidikan. *tafahham*, 1(1).
- santika, i. g. n. (2017). kepala sekolah dalam konsep kepemimpinan pendidikan: suatu kajian teoritis. *widya accarya*, 7(1).
- sholikhah, e. (2019). peminjaman kebijakan (*policy borrowing*) untuk perencanaan pendidikan. *foundasia*, 10(1).
- siswoyo, d., sukardi, j. s., & efianingrum, a. (2018). transformasi nilai-nilai inti budaya dalam perbaikan sekolah. *foundasia*, 9(1).
- suja'i, a. (2018). prinsip-prinsip perencanaan pendidikan dalam perspektif al-qur'an. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v11i2.3772>